



PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PENGELUARAN PERKAPITA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

Bungaran Silalahi¹ dan Dede Ruslan¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara,
 Jl Prof T. M. Hanafiah, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Indonesia
 E-mail Corresponding: bungaransilalahi@gmail.com

ABSTRAK

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah dimana mencerminkan daya beli masyarakat. Penelitian bertujuan untuk melihat gambaran pengeluaran perkapita di Provinsi Sumatera Utara pada tingkat kabupaten/kota dan melihat pengaruh variable jumlah penduduk, upah Minimum dan tingkat pengangguran terhadap pengeluaran perkapita di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan menggunakan model regresi data *cross Section* uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran perkapita sedangkan jumlah penduduk dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan terkait peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat yang dapat diartikan mendorong konsumsi masyarakat sebagai penggerak perekonomian daerah.

Kata kunci: Pengeluaran perkapita, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran

PENDAHULUAN

Tolak ukur kesejahteraan yang paling mendasar yang dapat dilihat dari suatu negara atau daerah adalah tingkat perekonomiannya, dimana semakin baiknya perekonomian masyarakat mengindikasikan masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Masyarakat suatu daerah dapat dianggap sejahtera jika persentase pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari persentase pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok, sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang paling hakiki mencerminkan adanya interaksi ekonomi yang dapat menggambarkan interaksi ekonomi tersebut adalah tingginya daya beli masyarakat dan juga tingginya pengeluaran per kapita.

Pengeluaran per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi dan standar hidup suatu negara maupun daerah, di mana pengeluaran yang lebih tinggi biasanya menunjukkan kemampuan ekonomi yang lebih baik dan akses lebih besar terhadap kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut penjabaran BPS tahun 2024 Pengeluaran per kapita digunakan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Rata-rata pengeluaran per kapita mencerminkan standar hidup ekonomi masyarakat, namun suatu daerah belum tentu dapat menjaga pengeluarannya.

Pengeluaran per kapita secara keseluruhan berlandaskan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang ditujukan bagi barang dan jasa sesuai kebutuhan sehari-hari oleh rumah tangga dalam suatu periode tertentu (menurut Halim, 2012). Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023 pengeluaran per kapita merupakan ukuran yang ditetapkan oleh dalam menunjukkan dimensi standar hidup layak yang



merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Standar hidup layak sendiri merupakan dimensi dari kualitas hidup manusia dengan gambaran secara luas menunjukkan kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai efek dari semakin membaiknya ekonomi di suatu wilayah. Besar kecilnya pengeluaran per kapita ditimbulkan oleh berbagai factor. Dalam implementasi dari teori konsumsi Keynes dapat dijabarkan yakni: pendapatan rumah tangga, aset, suku bunga, jumlah penduduk dan komposisi penduduk, dimana faktor tersebut berpengaruh dalam konsumsi masyarakat yang dalam hal ini dilihat dari pengeluaran perkapita (Hermanto, 2014). Faktor yang paling mendekati untuk cakupan daerah adalah pendapatan rumah tangga, jumlah penduduk dan kualitas komposisi penduduk dalam hal ini digambarkan pada tingkat penganggurannya. Kondisi perekonomian suatu negara bergantung pada konsumsi rumah tangga serta pendapatan rumah tangga. Pada konsumsi rumah tangga terdapat pengeluaran konsumsi otonom yang merupakan pengeluaran yang terjadi tanpa adanya pendapatan yang masuk. Keynes juga beranggapan jika seseorang memiliki kecenderungan konsumsi yang tinggi maka pendapatan yang dimiliki habis untuk konsumsi dan apabila kecenderungan konsumsi yang dimiliki rendah maka pendapatan yang keluar untuk konsumsi hanya sebagian kecil. Terdapat hubungan searah antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi. Pendapatan menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi public, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk konsumsi juga akan semakin banyak (Sibirian, 2020).

Pengeluaran perkapita memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pendapatan dilihat dari aspek ekonominya, namun selain aspek ekonomi tersebut aspek demografis dan ketenagakerjaan juga berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita (Hasanah et al., 2021). Seperti diketahui dalam penghitungan pengeluaran perkapita aspek kependudukan menjadi aspek pembagi utama. Untuk ketenagakerjaan, tingkat pengangguran merupakan aspek yang berpengaruh dalam tingkat konsumsi dalam hal ini dilihat tingkat pengeluaran perkapitanya. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak buruk pada perekonomian suatu daerah yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Pendapatan rendah dapat menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi, yang akan menyulitkan masyarakat dalam mengakses barang dan jasa serta menurunkan tingkat kesejahteraan (Iqbal et al., 2018).

Sumatera Utara merupakan salah Provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, dengan Jumlah penduduk 15.588,500 (data BPS 2024) menempatkan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di Indonesia dan terbanyak di luar pulau Jawa. Berikut adalah lima besar provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia:

Tabel 1. Provinsi dengan Penduduk Terbanyak di Indonesia Tahun 2024

Urutan ke -	Provinsi	Jumlah Penduduk
1	Jawa Barat	49.405.808
2	Jawa Timur	41.149.974
3	Jawa Tengah	37.032.410
4	Sumatera Utara	15.115.206
5	Banten	12.251.985
6	DKI Jakarta	10.679.951
7	Sulawesi Selatan	9.225.747
8	Lampung	9.176.546
9	Sumatera Selatan	8.657.008
10	Riau	6.614.384

Sumber: BPS Indonesia (2024)



Sumatera Utara terbagi atas 33 Kabupaten kota dimana tiap kabupaten/kota nya memiliki kondisi yang berbeda-beda baik dari kultur, budaya sehingga berpengaruh juga pada konsumsi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tingginya PDRB belum tentu juga dapat mencerminkan tingginya pendapatan yang akan diterima masyarakat, dikhawatirkan adanya juga ketimpangan ataupun dalam pemerataan ekonomi, sehingga tidak berpengaruh terhadap masyarakat sehingga akan menurunkan pengeluaran perkapita dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 kabupaten serta 8 kota memiliki karakteristik dan potensi daerah yang berbeda-beda, sehingga dalam kebijakan yang akan mempengaruhi pendapatan masyarakat juga akan berbeda. Seperti dikatakan sebelumnya pendapatan menentukan besarnya pengeluaran konsumsi, semakin besar pendapatan, semakin banyak pengeluaran untuk konsumsi yang juga menghitung pengeluaran perkapita, namun tingginya tingkat pendapatan tidak berhasil jika tidak dapat di maksimalkan oleh masyarakat tersebut, dikarenakan tingginya tingkat pengangguran sehingga masyarakat tidak dapat berkontribusi terhadap perekonomian sumatera itu sendiri. Walaupun Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Utara tergolong tinggi dimana pada tahun 2024 Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 2.809.915,- (dua juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) tetapi tingkat pengangguran juga tinggi akan juga menghambat konsumsi masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran dimana pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas pada tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,89 % tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga dapat mempengaruhi seluruh perekonomian melalui "*multiplier effect*". Ketika banyak suatu daerah yang tidak bekerja akan menjadi beban dalam ekonomi dan mengurangi konsumsi yang secara langsung akan mengurangi pengeluaran per kapita secara keseluruhan, atau yang menjadi pertanyaan tingginya PDRB apakah dapat memang dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten kota di sumatera utara. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan riset terkait pengaruh dari jumlah penduduk, tingkat upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap pengeluaran per kapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana variabel-variabel tersebut memengaruhi konsumsi melalui pengeluaran per kapita yang juga akan menggambarkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di cakupan Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan pengambilan data di instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk *Cross Section* tahun 2022 di 34 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel jumlah penduduk (X_1), upah minimum (X_2) dan tingkat pengangguran (X_3) terhadap pengeluaran perkapita (Y). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda, yakni untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1, X_2, X_3) terhadap pengaruh dependen (Y), atau dalam model ekonometrika dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Dimana :

Y = Variabel Pengeluaran perkapita (dalam satuan rupiah)
 α = Konstanta



- b = Koefisien Regresi
 X_1 = Variabel Jumlah Penduduk (dalam satuan orang)
 X_2 = Variabel Upah Minimum (dalam satuan rupiah perbulan)
 X_3 = Variabel Tingkat Pengangguran (dalam satuan persentase)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengantar Pembahasan dan Data variabel

Seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel jumlah penduduk, upah Minimum dan tingkat pengangguran terhadap pengeluaran perkapita perkapita di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera utara tahun 2022 yang akan di jelaskan dalam tabel data berikut :

Tabel 2. Data Variabel dalam Penelitian

Kab/Kota	Variabel			
	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	Penduduk	Upah	Tingkat Pengangguran (%)
Nias	7.196	149.249	2.560.336	2,81
Mandailing Natal	10.061	484.874	2.560.336	7,64
Tapanuli Selatan	11.727	307.312	2.903.042	3,65
Tapanuli Tengah	10.495	374.734	2.830.884	7,97
Tapanuli Utara	11.892	318.424	2.564.054	1,07
Toba	12.475	212.133	2.701.117	1,39
Labuhan Batu	11.474	508.024	2.872.441	6,9
Asahan	11.515	787.681	2.819.625	6,26
Simalungun	11.524	1.021.615	2.614.164	5,51
Dairi	10.740	315.460	2.522.609	0,88
Karo	12.554	414.429	3.078.762	2,71
Deli Serdang	12.657	1.953.986	3.188.592	8,79
Langkat	11.439	1.039.926	2.711.000	6,88
Nias Selatan	7.195	373.674	2.522.609	3,69
Humbang Hasundutan	8.250	202.299	2.538.345	0,42
Pakpak Bharat	8.558	54.609	2.522.610	0,26
Samosir	8.991	139.337	2.522.609	1,16
Serdang Bedagai	11.499	667.998	2.869.292	4,98
Batu Bara	10.755	416.367	3.191.571	6,21
Padang Lawas Utara	10.447	267.275	2.768.095	4,31
Padang Lawas	9.207	267.275	2.758.828	5,9
Labuhanbatu Selatan	11.751	320.324	2.938.260	3,15
Labuanbatu Utara	12.258	390.954	2.869.293	3,75



Nias Utara	6.575	150.780	2.522.609	2,59
Nias Barat	6.152	91.346	2.522.609	0,53
Sibolga	12.135	90.366	3.006.826	7,05
Tanjungbalai	11.589	179.748	2.829.107	4,62
Pematangsiantar	12.744	274.056	2.523.361	9,36
Tebing Tinggi	13.144	177.785	2.565.424	6,39
Medan	15.503	2.494.512	3.370.645	8,89
Binjai	11.358	300.009	2.630.684	6,36
Padangsidempuan	11.337	231.062	2.704.386	7,76
Gunungsitoli	8.434	137.583	2.610.348	3,65
Sumatera Utara	10.848	15.115.206	2.499.423	6,16

Sumber: BPS Sumatera Utara (2022)

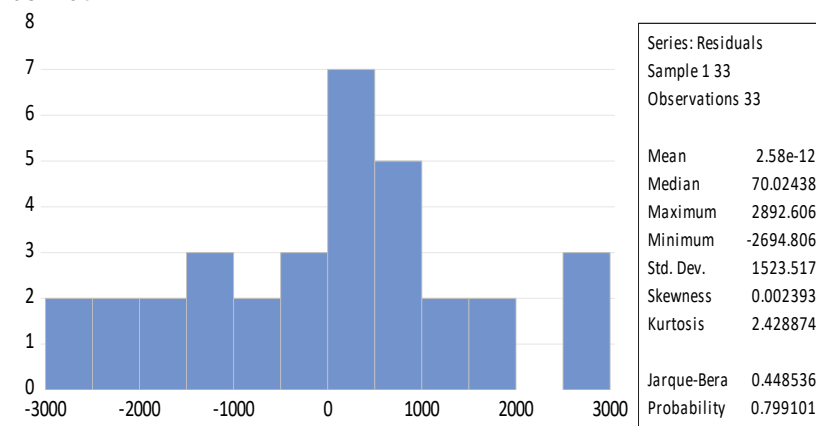
Dari data diatas terdapatnya beberapa kabupaten kota yang pengeluaran perkapita di bawah pendapatan perkapita Provinsi Sumatera utara tetapi juga terdapat daerah yang pengeluaran perkapita jauh diatas pengeluaran perkapita Provinsi. Kota Medan merupakan daerah dengan pengeluaran perkapita tertinggi dan Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah dengan pengeluaran perkapita terendah.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum uji signifikansi pengaruh jumlah penduduk, tingkat upah dan tingkat pengangguran terhadap pengeluaran perkapita dilakukan, terlebih dahulu akan diuji asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi persyaratan untuk diuji.

A. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Menurut kriteria pengambilan keputusan Jika nilai sig > 0,05 maka data terdistribusi normal, Jika nilai sig < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Adapun hasil Uji Normalitas data adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah, 2025

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas Kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,799101 > 0,05 maka data terdistribusi Normal.



B. Uji Mutikolinieritas

Kriteria pengambilan keputusan, jika nilai VIF < 10, maka lolos uji mutikolinieritas, jika nilai VIF > 10, maka tidak lolos uji mutikolinieritas. Adapun hasil Uji Mutikolinieritas data adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	17429460	224.5696	NA
X ₁	5.37E-07	3.255413	1.802802
X ₂	2.60E-06	254.7095	1.696543
X ₃	15334.74	5.696908	1.422500

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil uji mutikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF variable X₁ sebesar 11.802802 < 10, nilai VIF variabel X₂ sebesar 1.696543 < 10 dan nilai VIF dan variabel X₃ sebesar 1.422500 < 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas atau lolos uji multikolinieritas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Kriteria pengambilan keputusan Jika nilai sig > 0,05 maka lolos Uji Heteroskedastisitas, Jika nilai sig < 0,05 maka tidak lolos Uji Heteroskedastisitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4062.019	2445.571	1.660970	0.1075
X ₁	-1.99E-05	0.000429	-0.046421	0.9633
X ₂	-0.000960	0.000944	-1.016572	0.3178
X ₃	-51.37231	72.53983	-0.708195	0.4845

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil uji heteroskedastisitas Glejser menunjukkan bahwa nilai probalitas variable X₁ sebesar 0.9633 > 0,05, nilai probalitas variable X₂ sebesar 0.3178 > 0,05 dan nilai probalitas variable X₃ sebesar 0.4845 > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

D. Uji Autokorelasi

Kriteria pengambilan keputusan Jika nilai sig > 0,05 maka lolos uji autokorelasi, Jika nilai sig < 0,05 maka tidak lolos uji autokorelasi. Hasil Uji Autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	1.254541	Prob. F(2,27)	0.3013
Obs*R-squared	2.805905	Prob. Chi-Square(2)	0.2459

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.2459 > 0.05, maka tidak ada masalah autokorelasi atau lolos uji autokorelasi.



3. Persamaan Regresi Linear Berganda

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda yang diolah dengan Eviews 12.0 dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-718.3723	4174.860	-0.172071	0.8646
X1	0.000549	0.000733	0.749287	0.4597
X2	0.003708	0.001612	2.300397	0.0288
X3	212.6269	123.8335	1.717038	0.0966

Sumber: Data Diolah (2025)

Dari hasil diatas, maka dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = -718.3723 + 0.000549 \cdot X_1 + 0.003708 \cdot X_2 + 212.6269 \cdot X_3$$

Adapun penjelasan adalah sebagai berikut:

- Nilai koefisien konstanta sebesar 718.3723 atau 7.183,723%, ini dapat diartikan bahwa tanpa adanya peningkatan jumlah penduduk (X_1), tingkat upah minimum (X_2) dan tingkat pengangguran (X_3) maka variabel pengeluaran perkapita (Y) akan mengalami penurunan sebesar 7.183,723%.
- Nilai Koefisien beta variable jumlah penduduk (X_1) sebesar 0.000549 atau sebesar 0.0549%, jika nilai variable lain konstan dan variable X_1 mengalami peningkatan 1% maka variabel pengeluaran perkapita (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.054%, hal ini mencerminkan adanya hubungan positif yang lemah antara jumlah penduduk dan pengeluaran per kapita. Meskipun tanda koefisien sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkatkan rata-rata konsumsi suatu daerah, hubungan ini lemah dalam konteks Sumatera Utara tahun 2022. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, dominasi populasi pedesaan dengan tingkat konsumsi rendah, serta karakteristik ekonomi daerah yang tidak memungkinkan pertumbuhan populasi memberikan dampak signifikan pada rata-rata pengeluaran per kapita.
- Nilai Koefisien beta variable tingkat upah minimum (X_2) sebesar 0.003708 atau sebesar 0.3708%, jika nilai variable lain konstan dan variable X_2 mengalami peningkatan 1% maka variabel pengeluaran perkapita (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.3708%. sehingga mendukung teori yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum meningkatkan daya beli masyarakat dan, pada gilirannya, mendorong peningkatan pengeluaran per kapita (rata-rata konsumsi). Hasil ini relevan dengan konsep ekonomi yang menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di kalangan pekerja berpenghasilan rendah, akan langsung meningkatkan konsumsi, karena kelompok ini cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, hubungan positif dan signifikan ini sesuai dengan teori serta mencerminkan efektivitas kebijakan peningkatan upah minimum dalam mendorong konsumsi masyarakat di Sumatera Utara.
- Nilai Koefisien beta variable tingkat pengangguran (X_3) sebesar 212.6269 atau sebesar 2.1262,69%, jika nilai variable lain konstan dan variable X_3 mengalami peningkatan 1% maka Variabel pengeluaran perkapita (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 2.1262,69%. Secara teori, tingkat pengangguran seharusnya berpengaruh negatif terhadap pengeluaran per kapita, karena meningkatnya pengangguran biasanya mengurangi pendapatan masyarakat dan daya beli. Namun, hasil yang bertentangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya program bantuan sosial atau transfer fiskal pemerintah yang mendukung konsumsi rumah tangga, meskipun tingkat pengangguran meningkat. Selain itu, kontribusi sektor informal dalam menopang pengeluaran masyarakat dapat



menjadi alasan lain. Dengan demikian, meskipun hasil ini tidak sesuai dengan teori, dapat dijustifikasi oleh kondisi ekonomi lokal atau intervensi kebijakan pemerintah di wilayah penelitian.

4. Hasil Uji Hipotesis

Kriteria pengambilan Keputusan (Hamid et al., 2020:99) adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Nilai t hitung positif	Nilai t hitung negatif	Keputusan
t hitung > t table atau sig. ≤ alpha	t hitung < -t table atau sig. ≤ alpha	Terima Ha
t hitung ≤ t table atau sig. > alpha	t hitung ≥ t table atau sig. > alpha	Terima Ho

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan Kriteria pengambilan keputusan tersebut maka pengaruh variable independent terhadap variable dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Nilai t hitung variable Jumlah Penduduk (X_1) sebesar $0.749287 < \text{nilai } t \text{ table yaitu } 2.04$ dan nilai Prob. $0.4597 \geq 0.05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Hal ini mungkin terjadi karena faktor-faktor lain, seperti distribusi pendapatan atau faktor ekonomi lainnya, yang lebih berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita daripada jumlah penduduk itu sendiri
2. Nilai t hitung variable Upah Minimum (X_2) sebesar $2.300397 < \text{nilai } t \text{ table yaitu } 2.04$ dan nilai Prob. $0.0288 \leq 0.05$ maka H_a diterima dan H_o diterima artinya Upah Minimum berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita. Hal ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Ini sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan upah minimum mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap konsumsi dan pengeluaran per kapita.
3. Nilai t hitung variable Pengangguran (X_3) sebesar $0.0966 < \text{nilai } t \text{ table yaitu } 2.04$ dan nilai Prob. $0.0966 \leq 0.05$ maka H_a diterima dan H_o diterima artinya pengangguran tidak berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita. Ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Meskipun secara teori tingkat pengangguran seharusnya berpengaruh negatif terhadap konsumsi, hasil ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti bantuan sosial pemerintah atau dinamika ekonomi lokal yang mendukung konsumsi meskipun ada peningkatan pengangguran.

5. Hasil Uji R-squared

Kriteria pengambilan Keputusan (Sihabudin et al., 2021:69): Jika F hitung > F Tabel atau sig. ≤ alpha, maka terima H_a , Jika F hitung ≤ F Tabel atau sig. > alpha, maka terima H_o .

Tabel 8. Hasil Uji R-Squared

R-squared	0.469874
Adjusted R-squared	0.415033
S.E. of regression	1600.381
Sum squared resid	74275369
Log likelihood	-288.1669
F-statistic	8.567988
Prob(F-statistic)	0.000315

Sumber: Data Diolah (2025)

Nilai F Hitung sebesar $8.567988 > F \text{ Tabel yaitu } 2.93$ dan nilai sig. yaitu $0.000315 \leq 0.05$ H_o dan ditolak dan H_a diterima, artinya jumlah penduduk (X_1), tingkat upah minimum (X_2) dan tingkat pengangguran (X_3) mempengaruhi pengeluaran perkapita (Y)



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran perkapita di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera utara tahun 2022, sedangkan jumlah penduduk dan pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil dari penelitian tersebut mengimplikasikan semakin besar penetapan upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera utara maka pengeluaran perkapita juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya kabupaten atau kota yang menerapkan upah minimum yang rendah maka pengeluaran perkapita daerah tersebut juga akan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, "Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota,")
- Adib, dkk. "Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" *Jurnal Ecosains*, Volume 8, Nomor 1 , Hal 67-76
- Andykha, R dkk. 2018. " Analisa Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah" *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 33 No. 2, Juli 2018, 113-123
- Adelia, Y. Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah" *Equilibrium* Volume 10. No. 2. Tahun 2021
- Iqbal, M., Junaidi, J., & Hardiani, H. (2018). Analisis pengaruh tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 7(3), 144–157. <https://doi.org/10.22437/jels.v7i3.11941>
- Oliviani, R. " Analisis pengaruh pengeluaran per kapita, tingkat pendidikan pekerja, dan upah minimum terhadap jumlah tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur". Skripsi. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH. Jakarta
- Siregar, D. K. (2023). *Analisis Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2012-2021*.
- Hasanah, R., Syaparuddin, S., & Rosmeli, R. (2021). Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 223–232. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16253>
- Hermanto, M. R. (2014). Studi aplikasi pengembangan teori Keynes dalam jumlah konsumsi individu muslim: bukti empiris pada individu muslim di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29259%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29259/1/MUHAMMAD REZA HERMANTO-FEB.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29259%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29259/1/MUHAMMAD%20REZA%20HERMANTO-FEB.pdf)
- Iqbal, M., Junaidi, J., & Hardiani, H. (2018). Analisis pengaruh tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 7(3), 144–157. <https://doi.org/10.22437/jels.v7i3.11941>
- Siburian, A. Y. (2020). Analisis Pengeluaran dan Tingkat Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) Di Kota Pekanbaru. *Skripsi*.